



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SAMBUTAN ANGGOTA V BPK RI

**DALAM ACARA PENYERAHAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN**

ATAS

**LAPORAN KEUANGAN 24 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. PEMKOT SEMARANG | 13. PEMKAB PURBALINGGA |
| 2. PEMKAB SEMARANG | 14. PEMKAB MAGELANG |
| 3. PEMKAB DEMAK | 15. PEMKAB TEMANGGUNG |
| 4. PEMKAB KUDUS | 16. PEMKAB WONOSOBO |
| 5. PEMKAB JEPARA | 17. PEMKOT MAGELANG |
| 6. PEMKAB PATI | 18. PEMKOT PEKALONGAN |
| 7. PEMKAB REMBANG | 19. PEMKAB PEKALONGAN |
| 8. PEMKAB KLATEN | 20. PEMKAB BANYUMAS |
| 9. PEMKAB SUKOHARJO | 21. PEMKAB KENDAL |
| 10. PEMKAB WONOGIRI | 22. PEMKAB TEGAL |
| 11. PEMKAB BANJARNEGARA | 23. PEMKOT TEGAL |
| 12. PEMKAB CILACAP | 24. PEMKAB PEMALANG |

SEMARANG, 7 JUNI 2017



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN ANGGOTA V
DALAM ACARA PENYERAHAN
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

Bismillahirrohmanirrohim.

- **Yang kami hormati Ketua DPRD Jawa Tengah;**
- **Yang kami hormati Gubernur Jawa Tengah;**
- **Yang kami hormati para Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah;**
- **Yang kami hormati Para Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Jawa Tengah;**
- **Yang kami hormati para Sekda, Inspektur, dan para Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah beserta jajarannya;**

- **Yang kami hormati Auditor Utama Keuangan Negara V;**
- **Yang kami hormati Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya;**
- **Yang kami hormati para tamu undangan dan hadirin yang kami muliakan.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

Mengawali sambutan ini, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat berkumpul bersama pada acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan 4 (empat) Pemerintah Kota dan 20 (dua puluh) Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016.

Perkenankan pula pada Bulan Suci Romadhon 1438H ini, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Mudah-mudahan di bulan yang penuh berkah dan pengampunan ini, kita diberkahi dan diampuni oleh Allah SWT. *Aamiin yaa Robbal'alamiin.*

Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama Pimpinan BPK, khususnya saya sebagai Anggota V yang berkesempatan untuk menyampaikan LHP ini, mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada para Pimpinan DPRD, Gubernur, Bupati, Walikota, atau yang mewakili beserta jajarannya, atas kerja samanya, sehingga secara bersama-sama kita selalu berusaha dan berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Sesuai peraturan perundang-undangan, dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, salah satu hal penting yang diatur adalah kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah, tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

Pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan.

Pasal 17 UU No. 15 Tahun 2004 mengamanatkan kepada BPK untuk menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan tersebut, kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Tahun 2016 ini merupakan tahun kedua bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seluruh Indonesia menerapkan akuntansi berbasis akrual, baik sistem akuntansinya maupun penyajian laporan keuangannya. Dengan penerapan LKPD berbasis akrual, Pemerintah Daerah dapat lebih komprehensif untuk menyajikan seluruh hak, kewajiban dan kekayaan serta perubahan kekayaan, hasil operasi, serta realisasi anggaran dan sisa anggaran lebih.

Hadirin yang saya hormati,

Pada kesempatan yang baik ini, perlu kami sampaikan bahwa secara keseluruhan, di Provinsi Jawa Tengah ini, dibandingkan dengan tahun anggaran 2015,

pada tahun 2016 ini jumlah Pemerintah Daerah yang telah kami periksa dan mendapatkan opini WTP adalah sebanyak 31 Pemda, atau sebesar 88,57 %. Dengan demikian, terdapat peningkatan sebesar 28,57%. Sementara itu sisanya sebanyak 4 (empat) Pemda masih mendapatkan opini WDP, dan 1 (satu) Pemda masih dalam proses pemeriksaan.

Namun demikian, meskipun telah terjadi peningkatan 28,57% atas opini WTP, sesungguhnya ada pula yang mengalami penurunan opini dari opini WTP menjadi opini WDP sebanyak 2 Pemda.

Perkembangan pertanggungjawaban keuangan yang baik ini, tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan buah kerja keras yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta koordinasi yang baik antara Pemerintah daerah dan BPK dalam upaya-upaya peningkatan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. Beberapa kegiatan yang kami lakukan dengan Pemda dalam 2 (dua) tahun terakhir, seperti:

- (1) Rapat koordinasi persiapan audit LKPD antara BPK dan Inspektorat Pemda;

- (2) *Knowledge sharing* metodologi dan mekanisme review Inspektorat atas LKPD unaudited; dan
- (3) Rapat koordinasi pimpinan BPK dan Kepala Daerah se-Jawa Tengah tentang pentingnya akuntabilitas dan transparan keuangan daerah adalah bentuk nyata tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berkelanjutan.

Upaya-upaya pemerintah daerah, telah dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara lebih transparan, akuntabel, dan juga memberi manfaat lebih, baik bagi para pemangku kepentingan, para pengguna, maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah. Hal ini direfleksikan dengan disajikannya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mulai tahun anggaran 2015 ke dalam 7 (tujuh) laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibanding dengan sebelum penerapan akrual yang hanya 4 (empat) laporan.

Terkait hal tersebut, perlu kami sampaikan bahwa pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan **opini atas laporan keuangan.**

Opini merupakan **pernyataan profesional pemeriksa** mengenai **tingkat kewajaran informasi** yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu, hal ini mungkin akan mempengaruhi opini terhadap kewajaran LK secara keseluruhan.

Dengan demikian, opini yang diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai **"kewajaran"** laporan keuangan, bukan merupakan "jaminan" tidak adanya *fraud* yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya *fraud* dikemudian hari. Hal ini perlu kami sampaikan, mengingat masih banyak terjadinya kesalahpahaman oleh sebagian kalangan mengenai makna Opini BPK.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 31 Laporan Keuangan Pemda di Jawa Tengah, yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Khusus untuk hari ini, dari 24 Kabupaten dan kota yang kami serahkan LHP LKPD-nya, sebanyak 21 Kabupaten/kota memperoleh opini WTP, sedangkan sisanya sebanyak 3 Kabupaten/Kota mendapatkan opini WDP. Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WTP yaitu:

1. Pemerintah Kota Semarang
2. Pemerintah Kabupaten Semarang
3. Pemerintah Kabupaten Demak
4. Pemerintah Kabupaten Pati
5. Pemerintah Kabupaten Kudus
6. Pemerintah Kabupaten Jepara
7. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
8. Pemerintah Kabupaten Wonogiri

9. Pemerintah Kabupaten Temanggung
10. Pemerintah Kabupaten Wonosobo
11. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
12. Pemerintah Kabupaten Magelang
13. Pemerintah Kota Magelang
14. Pemerintah Kabupaten Cilacap
15. Pemerintah Kabupaten Purbalingga
16. Pemerintah Kabupaten Kendal
17. Pemerintah Kabupaten Pekalongan
18. Pemerintah Kota Pekalongan
19. Pemerintah Kabupaten Pemalang
20. Pemerintah Kabupaten Tegal, dan
21. Pemerintah Kabupaten Banyumas

Saya ucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah meningkatkan opininya menjadi WTP, maupun yang telah mempertahankan opini WTP. Harapan kami, pemerintah daerah yang sudah memperoleh opini WTP, tetap harus menindaklanjuti temuan-temuan SPI dan Kepatuhan yang tidak material/signifikan mempengaruhi opini.

Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Dan selanjutnya, bagi pemda yang belum memperoleh WTP, agar menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang menjadi pengecualian, sehingga Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya dapat diperoleh Opini WTP.

Hadirin yang Berbahagia

Dalam upaya terus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK juga menyampaikan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, dan harus terus diperbaiki oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota, sehingga permasalahan-permasalahan tersebut tidak terulang kembali dimasa yang akan datang. Diantara permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian bersama antara lain:

1. Permasalahan aset tetap, diantaranya: (a) belum seluruh tanah Pemda dimiliki, dikuasai, dan bersertifikat; (b) penyerahan aset SMA/SMK, terminal, dan aset lainnya sesuai amanat UU 23/2015 belum berjalan lancar, belum seluruhnya diserahkan, dan belum dicatat secara memadai sesuai SAP, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota;

2. Permasalahan belanja, diantaranya: (a) Bantuan Sosial, Hibah, dan Bantuan Keuangan, belum/terlambat dipertanggungjawabkan oleh penerima tanpa dikenakan sanksi yg tegas; (b) Tunjangan Perumahan DPRD diberikan tanpa melalui survey independen tentang standard sewa yang wajar.
3. Permasalahan pendapatan, diantaranya: (a) pendapatan belum/terlambat disetor ke kas daerah, atau digunakan langsung untuk kepentingan operasional; (b) pendapatan pajak dan retribusi daerah, belum didukung dengan *database* subyek dan obyek pajak/retribusi yang akurat dan lengkap.

Hadirin yang saya hormati,

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.

Khusus mengenai tindak lanjut oleh DPRD, apabila terdapat kekurangjelasan atas isi materi LHP ini, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK dalam rangka menjelaskan materi hasil pemeriksaan.

Perlu kami informasikan, bahwa sebelum LHP atas Laporan Keuangan pada 24 Pemda Tahun 2016 ini kami serahkan, kami telah meminta tanggapan kepada 4 (empat) Pemerintah Kota dan 20 Pemerintah Kabupaten atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi atau *action plan* yang akan dilaksanakan oleh pihak Pemerintah Daerah tersebut, sehingga rekomendasi BPK menjadi bermanfaat dan mudah untuk ditindaklanjuti.

Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi, serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

BPK mempunyai keinginan yang kuat agar Pimpinan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Hadirin yang saya hormati,

Demikian yang dapat kami sampaikan pada acara penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2016 pada hari ini.

Perkenankan atas nama BPK RI, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Kami berharap agar Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memanfaatkan serta menggunakan informasi yang kami sampaikan dalam LHP tersebut. Demikian juga, kepada Bupati dan Walikota beserta jajarannya, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik selama proses pemeriksaan berlangsung. Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Akhirnya, apabila dalam penyampaian sambutan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wabillahittaufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA
Anggota V BPK,**

Ir. Isma Yatun, M.T.

